

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016-2020, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (uji t), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (uji t), Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (uji t), Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan (uji f), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan dengan nilai *adjusted R²* sebesar 9,20% terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dimana sisanya senilai 90,80% disebabkan oleh variabel yang tidak diteliti oleh peneliti.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji dan pembahasan penelitian, saran yang penulis ingin sampaikan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambahkan rasio-rasio kinerja keuangan lainnya dan menambahkan sampel penelitian yang lebih

meluas lagi cakupannya, tahun penelitian terbaru, metode pengujian lainnya.

2. Bagi pemerintah daerah, dengan mengetahui kinerja keuangan yang berpengaruh ataupun tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, maka penelitian ini berfungsi sebagai masukan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk memperhatikan konsep *value for money* yang terdiri dari tiga hal ekonomis, efektif, dan efisiensi sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan PAD.
3. Dengan mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sesuai hasil analisis variabel dikategorikan kurang, maka bagi pemerintah daerah diharapkan agar lebih meningkatkan penerimaan asli daerah untuk mencapai rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan cukup dan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dengan mengetahui rasio efektivitas PAD tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sesuai hasil analisis variabel dikategorikan kurang efektif, maka bagi pemerintah daerah diharapkan agar dapat meningkatkan realisasi PAD sesuai dengan yang ditargetkan dengan cara mampu menyediakan pelayanan masyarakat sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan demikian rasio efektivitas dapat meningkat menjadi efektif dan mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dengan mengetahui rasio derajat desentralisasi fiskal tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sesuai hasil analisis variabel

dikategorikan sangat kurang, maka bagi pemerintah daerah diharapkan agar dapat meningkatkan PAD dan mampu memanfaatkan pendapatan yang diberikan pemerintah pusat terutama dalam hal pembangunan agar desentralisasi dapat berjalan dengan baik. Sehingga rasio derajat desentralisasi dapat meningkat dikriteria baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

6. Bagi peneliti selanjutnya, dengan mengetahui pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 9,20%, diharapkan agar dapat menambah variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak diteliti oleh peneliti.